



DP3APPKB
KOTA TARAKAN

LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2025

**UNIT PEMILIK RISIKO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Daftar Lampiran	3
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Ruang Lingkup	6
 BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO	 7
A. Hasil Pemantauan.....	7
B. Hambatan Pengelolaan Risiko.....	8
 BAB III PENUTUP.....	 9



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Identifikasi Risiko.....	10
2. Lampiran 2 Analisis Risiko.....	12
3. Lampiran 3 Risiko Prioritas.....	13
4. Lampiran 4 Pengendalian Risiko.....	15
5. Lampiran 5 Rencana dan Realisasi Pemantauan atas kegiatan Pengendalian Intern.....	17
6. Lampiran 6 Pencatatan Kejadian Risiko.....	19



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri / Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam rangka mengimplemetasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Intern, sebagai acuan bagi para penyelenggara organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Intern periode tahun 2025 diprioritaskan untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran didukung system pengendalian intern yang memadai.

Sebagai Unit Pemilik Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP 60 tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota maka sejak perencanaan sampai dengan pelaporan pengelolaan risiko secara terintegrasi kedalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan ditetapkan sebagai Langkah awal akan wujud penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak penguatan SPIP atas adanya risiko baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ataupun Komponen SPIP lainnya.



Dengan diselenggarakannya SPIP diharapkan dapat mendukung pencapaian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku dan ditunjang dengan informasi ang berkualitas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
9. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko ;
10. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 700/HK-X/402/2021,tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Tarakan Tahun 2021;

11. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-V/272/2023, tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas Pengelolaan risiko pada Triwulan I tahun 2025 yang diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang bermuara pada pencapaian tujuan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko level strategis, analisis risiko, pengendalian risiko dan pemantauan kegiatan pengendalian serta pemantauan kejadian risiko pada Triwulan I tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Tarakan



BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO

A. Hasil Pemantauan

Pemantauan kinerja dan kejadian resiko dilakukan untuk mengetahui apakah target capaian indikator kinerja Triwulan I (satu) tahun 2025 yang telah ditetapkan tercapai dan apakah terdapat hambatan karena terjadinya risiko/masalah yang menghambat capaian target tersebut.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 8 (delapan). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat Lampiran 1.

b. Analisis Risiko

1. Jumlah risiko yang belum ada existing control 8 (delapan) risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko.
2. Jumlah risiko yang sudah ada existing control adalah Nihil risiko atau 0 % dari jumlah/populasi risiko namun belum memadai. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Evaluasi Risiko

1. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko belum ada Risiko. Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan Triwulan I sebanyak 8 (delapan) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindakan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.

3. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan Triwulan I Nihil, belum ada kegiatan pengendalian.
4. Belum terdapat kegiatan pengendalian karena dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
5. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 8 (delapan) risiko dari kegiatan pengendalian, Daftar rencana dan realisasi pemantauan atas kegiatan pengendalian intern yang dibutuhkan dapat dilihat pada Lampiran 5.

d. Kegiatan Pengendalian.

Pemantauan Keterjadian Risiko pada Triwulan I pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan I sebanyak Nihil kejadian. Daftar Pencatatan Kejadian risiko (Risk Event) dan RTP dapat dilihat pada Lampiran 6.

B. Hambatan Pengelolaan Risiko

Manajemen risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahaannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan belum terdapat kendala atau hambatan pada Triwulan I.



BAB III PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan telah melakukan analisis manajemen risiko disetiap program/kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan terdapat 8 risiko yang teridentifikasi.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring risiko. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi internal dan pengawasan secara berjenjang.
3. Melaksanankan pelatihan dan pembinaan.

Demikian laporan pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan untuk Triwulan I tahun 2025, agar dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Tarakan, 16 April 2025

Kepala Dinas,



Hasman Parigi, SE., M.M.
NIP. 19720822 201001 1 001

IDENTIFIKASI RISIKO

Lampiran 1

Nama Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Triwulan : I (satu)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di berbagai sektor pembangunan									
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga	IKU Sasaran: - IPG - IDG Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP) - Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)								
1.1.1	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif	- kurang optimalnya PUG	RSO.21.18.08.01	Kepala Bidang PPPA	Kurangnya koordinasi antar OPD	Internal	I	Anggaran kadang ada kadang tidak	DP3APPKB
1.1.1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan	RSO.21.18.08.02	Kepala Bidang PPPA	- belum terbentuknya UPTD PPA - SDM kurang berkualitas	eksternal	UC	Layanan belum opimal	Masyarakat (utamanya perempuan)
1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspuga yang aktif	Kecilnya presentase keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	RSO.21.18.08.03	Kepala Bidang PPPA	-SDM yang kurang berkualitas	eksternal	UC	Masyarakat belum banyak tahu apa itu kesetaraan gender dan perempuan yang dirugikan	Masyarakat
1.1.3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	terkendalanya pemenuhan indikator kota layak anak	RSO.21.18.08.04	Kepala Bidang PPPA	-SDM yang kurang berkualitas	eksternal	UC	Hak anak dalam sebuah kota tidak terpenuhi	Masyarakat
1.1.4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada anak	RSO.21.18.08.05	Kepala Bidang PPPA	- belum terbentuknya UPTD PPA - SDM kurang berkualitas	eksternal	UC	Layanan belum optimal	Masyarakat

1.1.2	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada anak	RSO.21.18.08.02	Kepala DP3APPKB	- belum terbentuknya UPTD PPA - SDM kurang berkualitas	Eksternal/ Internal	C/UC	- tidak optimalnya pelayanan	1. DP3APPKB 2. Masyarakat/ Client
2	Tujuan Strategis : Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan KB dan KS									
2.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya Aseptor KB	IKU Sasaran: 1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)								
2.1.1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	- juknis yang terlambat muncul	RSO.21.18.08.06	Kepala Bidang PPKB	menunggu hasil juknis dari pusat	Eksternal	C	perubahan pada rekening belanja kegiatan pada dokumen perencanaan	1. Pemerintah Kota 2. DP3APPKB
2.1.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Masih adanya masyarakat yang belum terpapar isi program KKBPK	RSO.21.18.08.07	Kepala Bidang PPKB	Kurangnya optimalnya KIE yang dilaksanakan	internal	C	Target tidak terpenuhi	1. Pemerintah Kota 2. DP3APPKB
2.1.3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Adanya permasalahan yang dihadapi oleh kader	RSO.21.18.08.08	Kepala Bidang PPKB	Data pada kader yang kurang optimal	Eksternal	UC	Pencapaian target program kerja terhambat	1. Pemerintah Kota 2. DP3APPKB

ANALISIS RISIKO

Nama Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Triwulan : I (satu)

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	- kurang optimalnya PUG	RSO.21.18.08.01	3,33	3,17	10,56
2	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan	RSO.21.18.08.02	3,17	3,17	10,03
3	Kecilnya presentase keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	RSO.21.18.08.03	2,33	0,00	0,00
4	terkendalanya pemenuhan indikator kota layak anak	RSO.21.18.08.04	0,00	3,00	0,00
5	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada anak	RSO.21.18.08.05	2,17	3,17	6,86
6	- juknis yang terlambat muncul	RSO.21.18.08.06	2,33	3,50	8,17
7	Masih adanya masyarakat yang belum terpapar isi program KKBPK	RSO.21.18.08.07	3,33	3,33	11,11
8	Adanya permasalahan yang dihadapi oleh kader	RSO.21.18.08.08	2,33	3,17	7,39

RISIKO PRIORITAS

Nama Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Triwulan : I (satu)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	- kurang optimalnya PUG	RSO.21.18.08.01	10,56	Kepala Bidang PPPA	Kurangnya koordinasi antar OPD	Anggaran kadang ada kadang tidak
2	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan	RSO.21.18.08.02	10,03	Kepala Bidang PPPA	- belum terbentuknya UPTD PPA - SDM kurang berkualitas	Layanan belum optimal
3	Kecilnya presentase keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	RSO.21.18.08.03	0,00	Kepala Bidang PPPA	-SDM yang kurang berkualitas	Masyarakat belum banyak tahu apa itu kesetaraan gender dan perempuan yang dirugikan
4	terkendalanya pemenuhan indikator kota layak anak	RSO.21.18.08.04	0,00	Kepala Bidang PPPA	-SDM yang kurang berkualitas	Hak anak dalam sebuah kota tidak terpenuhi
5	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada anak	RSO.21.18.08.05	6,86	Kepala Bidang PPPA	- belum terbentuknya UPTD PPA - SDM kurang berkualitas	Layanan belum optimal

6	- juknis yang terlambat muncul	RSO.21.18.08.06	8,17	Kepala Bidang PPKB	menunggu hasil juknis dari pusat	perubahan pada rekening belanja kegiatan pada dokumen perencanaan
7	Masih adanya masyarakat yang belum terpapar isi program KKBPK	RSO.21.18.08.07	11,11	Kepala Bidang PPKB	Kurangnya optimalnya KIE yang dilaksanakan	perubahan pada rekening belanja kegiatan pada dokumen perencanaan
8	Adanya permasalahan yang dihadapi oleh kader	RSO.21.18.08.08	7,39	Kepala Bidang PPKB	Data pada kader yang kurang optimal	Pencapaian target program kerja terhambat

PENGENDALIAN RISIKO

Nama Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Triwulan : I (satu)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	- kurang optimalnya PUG	RSO.21.18.08.01	- Meningkatkan koordinasi dengan gugus tugas pokja PUG	-pengusulan anggaran	- Koordinasi dengan gugus tugas pokja PUG	Kepala Bidang PPPA	Triwulan III 2025
2	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan	RSO.21.18.08.02	-Kerjasama dengan instansi terkait OPD terkait dan Dinas/Lembaga Vertikal - SOP Pelayanan Kasus Kekerasan - Koordinasi dengan Kemen PPPA		- Penyusunan rencana pelatihan SDM - Menyusun laporan hasil penanganan kasus kekerasan pada anak dan tidaklanjut hasil penanganan kasus kekerasan pada perempuan - Koordinasi dengan Kemen PPPA	Kepala Bidang PPPA	Triwulan II 2025
3	Kecilnya presentase keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	RSO.21.18.08.03	-pembuatan brosur/leaflet	-pengusulan anggaran	- Evaluasi peningkatan keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	Kepala Bidang PPPA	Triwulan IV 2025
4	terkendalanya pemenuhan indikator kota layak anak	RSO.21.18.08.04	- meningkatkan data pemenuhan indikator KLA		- Evaluasi data pemenuhan KLA - Pemenuhan data KLA	Kepala Bidang PPPA	Triwulan II 2025

5	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada anak	RSO.21.18.08.05	-Kerjasama dengan instansi terkait OPD terkait dan Dinas/Lembaga Vertikal - SOP Pelayanan Kasus Kekerasan - Koordinasi dengan Kemen PPPA		- Evaluasi SP dan SOP pelayanan kasus kekerasan - Menyusun laporan hasil penanganan kasus kekerasan pada anak dan tidaklanjut hasil penanganan kasus kekerasan pada anak - Koordinasi dengan Kemen PPPA	Kepala DP3APPKB	Triwulan II 2025
6	- juknis yang terlambat muncul	RSO.21.18.08.06	- koordinasi dengan Bappeda dan BPKPAD tentang juknis kegiatan yang baru terbit	- koordinasi dengan Bappeda dan BPKPAD tentang juknis kegiatan	- Usulan perubahan rekening program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja di dokumen perencanaan	- Sekretaris	Triwulan II dan IV 2025
7	Masih adanya masyarakat yang belum terpapar isi program KKBPK	RSO.21.18.08.07	dilakukan edukasi dan berusaha mencari calon akseptor lain, tetapi waktu tidak cukup -Koordinasi atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Tarakan		- pembuatan telaaf staf	Kepala Bidang PPKB	Triwulan IV 2025
8	Adanya permasalahan yang dihadapi oleh kader	RSO.21.18.08.08	- Permasalahan ini sudah disampaikan pada saat rapat bidang		- Pelatihan dan Pembinaan Kader	Kepala Bidang PPKB	Triwulan III 2025

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
 Triwulan : I (satu)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	- Koordinasi dengan gugus tugas pokja PUG	Koordinasi, dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Oktober 2025	Monitoring telah dilaksanakan dan didokumentasikan
2	- Penyusunan rencana pelatihan SDM - Menyusun laporan hasil penanganan kasus kekerasan pada anak dan tidaklanjut hasil penanganan kasus kekerasan pada perempuan - Koordinasi dengan Kemen PPPA	Konfirmasi persiapan, dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	September 2025	Monitoring telah dilaksanakan, dan didokumentasikan
3	- Evaluasi peningkatan keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	Koordinasi dan dokumentasi kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Oktober 2025	Monitoring telah dilaksanakan dan didokumentasikan
4	- Evaluasi data pemenuhan KLA - Pemenuhan data KLA	Koordinasi dan dokumentasi kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Agustus 2025	Monitoring telah dilaksanakan dan didokumentasikan
5	- Evaluasi SP dan SOP pelayanan kasus kekerasan - Menyusun laporan hasil penanganan kasus kekerasan pada anak dan tidaklanjut hasil penanganan kasus kekerasan pada anak - Koordinasi dengan Kemen PPPA	Konfirmasi persiapan, dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Agustus 2025	Monitoring telah dilaksanakan, dan didokumentasikan

6	- Usulan perubahan rekening program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja di dokumen perencanaan	Perubahan Dokumen Anggaran	- Kepala Dinas DP3APPKB - Sekretaris	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	September 2025	Monitoring telah dilaksanakan, dan didokumentasikan
7	- pembuatan telaaf staf	Koordinasi dan dokumentasi kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPKB	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	September 2025	Monitoring telah dilaksanakan, dan didokumentasikan
8	- Pelatihan dan Pembinaan Kader	Koordinasi dan dokumentasi kegiatan	- Kepala Dinas DP3APPKB - Kabid PPKB	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	September 2025	Monitoring telah dilaksanakan, dan didokumentasikan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Triwulan : I (satu)

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
1	- kurang optimalnya PUG	RSO.21.18.08.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Koordinasi dengan gugus tugas pokja PUG	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Oktober 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, dokumen berupa foto kegiatan
2	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan	RSO.21.18.08.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Penyusunan rencana pelatihan SDM - Menyusun laporan hasil penanganan kasus kekerasan pada anak dan tidaklanjut hasil penanganan kasus kekerasan pada perempuan - Koordinasi dengan Kemen PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	September 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen: MoU, SOP, screenshot wa
3	Kecilnya presentase keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	RSO.21.18.08.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Evaluasi peningkatan keluarga yang mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Oktober 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, dokumen berupa foto kegiatan
4	terkendalanya pemenuhan indikator kota layak anak	RSO.21.18.08.04	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Evaluasi data pemenuhan KLA - Pemenuhan data KLA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Agustus 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, dokumen berupa foto kegiatan

5	- kurang optimalnya pelayanan kasus kekerasan pada anak	RSO.21.18.08.05	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Evaluasi SP dan SOP pelayanan kasus kekerasan - Menyusun laporan hasil penanganan kasus kekerasan pada anak dan tidaklanjut hasil penanganan kasus kekerasan pada anak - Koordinasi dengan Kemen PPPA	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	Agustus 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen: MoU, SOP, screenshot wa
6	- juknis yang terlambat muncul	RSO.21.18.08.06	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Usulan perubahan rekening program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja di dokumen perencanaan	triwulan I, II, III, IV pada TA 2025	September 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen: DPAP 2024
7	Masih adanya masyarakat yang belum terpapar isi program KKBPK	RSO.21.18.08.07	Terjadi	Terjadi	Terjadi	Terjadi	- pembuatan telaah staf	0	September 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen: telaah staf
8	Adanya permasalahan yang dihadapi oleh kader	RSO.21.18.08.08	Terjadi	Terjadi	Terjadi	Terjadi	- Pelatihan dan Pembinaan Kader	0	September 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen: foto

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN I

Senin, 14 April 2025



NOTULEN
RAPAT TRIWULAN I TAHUN 2025

Hari/Tanggal	: Senin, 14 April 2025
Waktu	: 08.00 wita sampai dengan selesai
Tempat	: Ruang Kerja Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan
Agenda Rapat	: Monev Triwulan I (Jan s/d Maret 2025)
1. Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan
2. Tujuan Rapat	: Monev kinerja dan mengetahui kendala pencapaian realisasi triwulan I
3. Peserta Rapat	: Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid PPPA, Kabid PPKB, Kasubag, Jafung dan staf
4. Pembukaan oleh Kepala Dinas	: Kepala Dinas menyampaikan maksud dan tujuan diadakan rapat dan meminta kepada kepala bidang untuk menyesuaikan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada anggaran kas, jangan sampai serapan realisasinya rendah.
5. Jalannya Rapat oleh Sekretaris	: Rapat monev kinerja hari ini akan membahas 3 agenda, yaitu terkait evaluasi kinerja serta kendala dalam capaian realisasi triwulan I dan rencana aksi serta monev RTP
6. Kabid PPPA & Kabid PPKB	: Penyerapan anggaran belum sesuai dengan target rencana aksi dan tarikan anggaran kas, untuk itu pada triwulan selanjutnya .
7. Kabid PPPA & Kabid PPKB	: Untuk sumber dana APBD rata-rata jadwal pelaksanaannya terletak pada triwulan II dan triwulan III.
8. Kesimpulan	Untuk kedepannya PPTK harus menelaraskan tarikan anggaran kas yang : sesuai agar serapan realisasinya sesuai dengan target baik kinerja, rencana aksi dan RTP
9. Penutup oleh Sekretaris	: Rapat ditutup dengan harapan rapat monev kinerja hari ini dapat acuan perbaikan pada triwulan selanjutnya, sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan tepat sasaran.

Tarakan, 14 April 2025

Mengetahui
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan



Hasman Parigi, S.E, M.M
Pembina /IVb
NIP. 19720822 2010011 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JALAN JENDRAL SUDIIRMAN NOMOR 76 GEDUNG GADIS 1 LANTAI 2 PAMUSIAN
TARAKAN (Kode Pos 7711)

Tarakan, 3 Oktober 2025

Nomor : 900/058/DP3APPKB

Hal : Undangan Rapat

Yth : Bapak/Ibu Pejabat Struktural, JFT dan
pelaksana di lingkungan DP3APPKB

Dengan hormat,

Memohon kehadiran bapak/ibu dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 08.00 wita - selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas DP3APPKB

Acara :

1. Pembahasan Monev Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025
2. Pembahasan Monev Rencana Aksi Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
3. Pembahasan Monev RTP dan RSO Triwulan III Tahun Anggaran 2025

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tarakan, 3 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Dinas DP3APPKB Kota Tarakan

Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19720822 2010011 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL

: Senin / 6 Oktober 2025

ACARA

: Pembahasan Monev Kinerja, Monev Rencana Aksi dan Monev

TEMPAT

: Rencana Tindak Pengendalian Resiko Triwulan III Tahun Anggaran

: Ruang Kerja Kepala DP3APPKB Kota Tarakan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Herman p	Kubis	
2			
3	Irmina Rini s	sekretaris	
4	Rinny F	Kabid PPPA	
5	JHONES CALVIN		
6	Anison	Karubay PKK	
7	Eddy M.	Pangreh KKB	
8	Agus	Penguluh PK	
9	Joko p	Staf Perencanaan	
10	M. Rasyid R	PKK	
11	MARDIAH	PRATAP PP & PA	
12	Sudi wahyuni	Staf	
13	Etni Kurniawati	Staf	
14	Sumardi	Staf PPA	
15	Rahmawati	Staf	
16	Robi Sugeng	Penelaah Kebijakan Teknis	
17	Dian Hasmarani	Penelaah Kebijakan Teknis	
18	Shubert	Penguluh masyarakat	
19			

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

Tarakan, 10 Juli 2025

Kepala DP3APPKB



HASMAN PARIGI, SE.M.M <

NIP.197208222010011001